

PENYELESAIAN SENGKETA PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Lingga Nugraha¹, Herliana²

INTISARI

Penelitian ini mengenai penyelesaian sengketa konstruksi pada forum arbitrase yang diperiksa serta diputus oleh BANI. Adapun putusan dari Pengadilan Negeri Palembang Nomor 144/Pdt.Sus-Arbt/2017/PN.Plg. dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan perkara Nomor 441/B/Pdt.Sus-Arbt/2018 yang membatalkan putusan BANI Nomor 894/X/ARB-BANI/2016 tertanggal 15 Juni 2017 serta menunjuk BADAPSKI untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi diantara para pihak. perjanjian ataupun klausula arbitrase tidak menyebutkan lembaga arbitrase BADAPSKI sebagai forum penyelesaian. Hal itu justru terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Palembang yang pada perjanjian arbitrasenya tidak menunjuk BADAPSKI, sehingga peneliti mencari alasan apa saja dari para pihak yang memilih BANI sebagai lembaga arbitrase yang memeriksa dan memutus sengketa konstruksi yang terjadi serta membandingkan peraturan dan prosedur arbitrase BANI dan BADAPSKI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Pada hasil penelitian, ditemukan bahwa BANI sebagai lembaga arbitrase yang juga memeriksa dan memutus sengketa konstruksi menjadi pilihan utama bagi para pihak yang terkait dalam pekerjaan konstruksi. Pengalaman membentuk citra yang melekat sebagai lembaga arbitrase yang terpercaya serta kapasitas yang tidak diragukan. Adapun mengenai peraturan dan prosedur BANI dan BADAPSKI secara umum keduanya memiliki kesamaan walaupun ada beberapa hal yang menjadi pembeda, BADAPSKI memberikan kemudahan pada pihak yang dibiayai oleh APBD atau APBN. Diketahui bahwa proses beracara BANI memang lebih unggul karena implementasinya yg lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh para pihak yang bersengketa sehingga tingkat keterpilihan BANI sebagai lembaga arbitrase yang dipilih para pihak lebih tinggi dari BADAPSKI.

Kata kunci: BANI, arbitrase, sengketa konstruksi, BADAPSKI

¹ Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

DISPUTE OF SETTLEMENT CONSTRUCTION WORK IN BANI ARBITRATION CENTER BASED ON LAW NUMBER 2/2017 ON CONSTRUCTION SERVICES

Lingga Nugraha³, Herliana⁴

ABSTRACT

This research is about the settlement of construction disputes at the arbitration forum which was examined and decided by BANI. as for the decision of the Palembang District Court Number 144 / Pdt.Sus-Arbit / 2017 / PN.Plg. strengthened by the Supreme Court through case decision Number 441 / B / Pdt.Sus-Arbit / 2018 which canceled BANI's decision Number 894 / X / ARB-BANI / 2016 dated June 15, 2017 and appointed BADAPSKI to examine and resolve disputes between parties. In the case a quo, the agreement or arbitration clause does not mention the arbitration institution BADAPSKI as a settlement forum. However, this happened in the Palembang District Court's decision, so researchers looked for any reason from the parties who chose BANI as an arbitration institution that examined and decided on construction disputes that occurred and compared BANI and BADAPSKI arbitration rules and procedures.

This research uses descriptive normative legal research method with the research approach used is the law approach and case approach. The secondary data obtained were analyzed qualitatively and then a conclusion.

In the research results, it was found that BANI as an arbitration institution that also checks and decides construction disputes becomes the main choice for the parties involved in construction work. experience forms the inherent image of a trusted arbitral institution and undoubted capacity. As for the rules and procedures of BANI and BADAPSKI in general, both have similarities, although there are some things that make a difference, BADAPSKI provides facilities for parties financed by the APBD or APBN. However, in the BANI proceedings the process is more established because its implementation is more easily understood and understood by the parties to the dispute so that the level of BANI's choice as an arbitration institution chosen by the parties is higher than BADAPSKI.

keyword: BANI, arbitration, construction, disputes, BADAPSKI

³ Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

